

Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

**Yan Sudandi Sasue¹
Johannis E. Kaawoan²
Daud M. Liando³**

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisa keterlibatan perempuan dalam jabatan politik khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe. Dalam INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi dalam program-program pembangunan nasional. Adanya kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan bisa menciptakan hasil yang maksimal dari program-program pembangunan yang telah di rencanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Penelitian ini memfokuskan pada analisis keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di DPRD kabupaten Sangihe yang di kaji dengan teori Menurut Daft (2003:314) menjelaskan bahwa analisis SWOT merupakan analisis terhadap empat elemen: Kekuatan, KElemahan, Peluang dan Ancaman. Hasil penelitian menunjukkan Kekuatan yang dimiliki oleh perempuan untuk bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan adalah berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri atau dengan kata factor internal dari perempuan itu yang bisa menjadi sebuah modal awal untuk bisa menjadi pegangan untuk terlibat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sangihe.

Kata Kunci : Analisis, Perempuan, Jabatan Politik

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam bidang politik pemerintahan seperti yang kita ketahui hak dari setiap warga negara adalah hak memilih dan hak dipilih. Hak memilih bisa kita garis bawahi adalah keaktifan dalam pelaksanaan pemilu sedangkan hak dipilih yakni ikut dalam menduduki kursi legislatif dan eksekutif yang secara langsung ikut serta dalam merancang, menyusun dan menjalankan kebijakan yang berdampak bagi seluruh warga negara.

Indonesia yang mengaku sebagai negara demokrasi seharusnya bisa menjadi kekuatan besar melalui masyarakat sipilnya. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik bisa menciptakan suatu kondisi yang ideal dalam negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Perempuan seharusnya memanfaatkan peluang serta kesempatan yang ada untuk mengambil peran dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang juga akan berdampak pada kehidupannya. Partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan akan menjadi salah satu langkah untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Keterlibatan tersebut bisa dilihat dari setiap pembuatan kebijakan di DPRD serta pengambilan keputusan, namun keterlibatan perempuan dalam jabatan-jabatan politik masih terlihat kurang. Di negara republik Indonesia setelah kemerdekaan sampai sekarang yang menduduki kepala negara sekaligus kepala pemerintahan hanya ada 1 sosok perempuan sebagai presiden republik Indonesia

pada tahun 2001 sampai 2004 yaitu Megawati Soekarnoputri. Bahkan dalam Lembaga legislatif yang menduduki kursi DPR RI dalam pemilihan 2019 keterwakilan perempuan mencapai angka 20,8 % atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI.

Dalam penelitian terdahulu oleh Jein Hilda Palandung (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Pemberdayaan Politik Perempuan Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dengan objek penelitian yang sama yaitu perempuan dalam politik.

Di Sulawesi Utara sesuai dengan salah satu organisasi perempuan yaitu PEKA Manguni Sulut yang visinya "Mendorong Perempuan Sadar Pemilu Namun Tetap Dalam Prinsip Menjaga Kebudayaan". Ketua PEKA yang merupakan seorang perempuan mengungkapkan kegelisahannya dalam acara *launching* PEKA ia menilai bahwa merupakan tantangan Ketika melihat fakta jumlah perempuan di parlemen, di lembaga-lembaga pembuat undang-undang masih kurang. "Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu kondisi yang dibutuhkan untuk pemenuhan proses demokrasi. Hal ini dengan harapan perempuan akan tampil sebagai pembuat kebijakan dan memberi kontribusi pada kesetaraan gender dalam kehidupan berdemokrasi", (Dr. Mayske R. Liando, S.Pd, M.Pd). Bahkan juga menurut sekretaris umum organisasi PEKA sesuai dengan penelitian dan kajian bahwa partisipasi 30% perempuan dalam pencalonan hanya sekedar menjadi syarat bahkan ada pula yang

asal-asalan hanya agar supaya bisa memenuhi 30% kuota perempuan dan partai politik tersebut bisa lolos dalam pencalonan anggota legislatif.

Daerah pemilihan di Kabupaten Kepulauan Sangihe terbagi menjadi 3 (tiga) daerah pemilihan (dapil) yaitu, dapil 1, dapil 2, dan dapil 3. Pemilihan anggota DPRD di Kabupateen Kepulauan Sangihe periode 2019-2024 diikuti oleh 12 partai di dapil 1, 12 partai politik di dapil 2, dan 10 partai politik di dapil 3. Dari jumlah partai politik di setiap dapil dengan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe ada beberapa partai politik yang hanya maju di salah satu dapil ataupun 2 dapil, misalnya partai PKB hanya ada di dapil 1, partai PAN ada di dapil 1 dan 2, dan juga partai PKS hanya ada di dapil 2. Adapun angka partisipasi perempuan dalam calon anggota DPRD kabupaten Sangihe di semua partai politik dalam daerah pemilihan semuanya mencapai angka 30% bahkan melewatinya.

Dari data di atas ditemukan bahwa posisi partai politik telah menjadi pendukung kebijakan afirmatif dari pemerintah dengan mengikutsertakan perempuan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sangihe dengan kuota 30%.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan data bahwa dalam keaggotaan DPRD kabupaten kepulauan Sangihe periode 2019-2024 ada 3 orang atau 12% keterlibatan perempuan sebagai anggota DPRD perempuan dari 25 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dari data yang peneliti dapat melalui pengamatan sementara, yang ingin peneliti kaji saat ini, bagaimana dan apa masalah yang dihadapi oleh

seorang perempuan untuk bisa terlibat dalam jabatan politik di kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketika pemerintah sudah membuka ruang yang besar untuk perempuan bisa melibatkan diri.

Tinjauan Pustaka **Analisis SWOT**

Menurut Freddy Rangkuti (2003:19) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*), dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Menurut A. Wijaya Tunggal (2001:74-75) SWOT ialah akronim untuk kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) internal suatu perusahaan dan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan identifikasi yang sistematis dari faktor-faktor ini dan strategi yang menggambarkan pedoman yang terkait antara mereka. Analisis SWOT dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Peluang (*Opportunities*) Suatu peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan utama adalah salah satu dari peluang. Identifikasi dari segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan-perubahan dan keadaan bersaing, peraturan-peraturan dalam perubahan teknologi, serta hubungan pembeli dan pemasok yang dapat diperbaiki dapat

menunjukkan peluang bagi perusahaan.

2. Ancaman (*Threats*) Suatu ancaman adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman adalah suatu rintangan-rintangan utama bagi posisi perusahaan sekarang atau yang diinginkan dari perusahaan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, daya tawar pembeli dan pemasok utama yang meningkat, perubahan teknologi dan peraturan yang direvisi atau peraturan baru dapat merupakan ancaman bagi perusahaan.
3. Kekuatan (*Strengths*) Kekuatan adalah sumberdaya, keterampilan dan keunggulan lain yang relatif terhadap pesaing dan kekuatan dari pasar suatu perusahaan untuk melayani.
4. Kelemahan (*Weakness*) Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan dan kemauan yang secara serius menghalangi kinerja suatu perusahaan.

Menurut Daft (2003:314) menjelaskan bahwa analisis SWOT merupakan analisis terhadap empat elemen yang terdiri dari:

1. Kekuatan (*Strengths*) Merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategi.
2. Kelemahan (*Weakness*) Merupakan karakteristik internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi.
3. Peluang (*Opportunity*) Merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi

meraih dan melampaui sasaran strateginya.

4. Ancaman (*Threats*) Merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategi yang telah ditetapkan.

Gender Dan Budaya Patriarki

Handayani dan Sugiarti (2008) mengatakan bahwa konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2015: 874) gender merupakan pembagian status dan peran yang secara kultural tidak adil dimana status dan peran laki-laki dianggap superior sedangkan perempuan di posisi inferior akan memunculkan gejala diskriminasi gender

Menurut Bressler, Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melambagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan (Charles E, Bressler, 2007).

Menurut Koentjaraningrat, Budaya dan ideologi bukan satu hal yang turun dari langit. Ia di bentuk oleh manusia dan disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya adalah faktor mental yang menentukan perbuatan seseorang atau masyarakat (Koentjaraningrat, 1974).

Berdasarkan tesis Koentjaraningrat di atas, maka mewujudkan kesetaraan gender bukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh suatu kelompok atau suatu Bangsa, meskipun budaya patriarki sudah berlangsung lama. Mewujudkan kesetaraan gender merupakan agenda jangka panjang yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Karena merubah budaya yang diawali dari perubahan mental dalam memandang sesuatu, membutuhkan waktu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu bagaimana keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di kabupaten kepulauan Sangihe maka peneliti memilih informan sebagai berikut:

1. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe perempuan periode 2019-2024 orang
2. Calon Anggota DPRD kabupaten Sangihe periode 2019-2024 yang tidak terpilih 2 orang
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 orang
4. Masyarakat Kabupaten Sangihe 3 orang.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara dimana menurut Sugiyono (2013:225) "teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi".

Pembahasan

Penelitian ini berfokus pada analisis SWOT untuk menganalisa keterlibatan perempuan di jabatan politik khususnya menjadi anggota legislative di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu :

1. Kekuatan (*Strengths*)
2. Kelemahan (*Weakness*)
3. Peluang (*Opportunity*)
4. Ancaman (*Threats*)

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan berdasarkan beberapa teori adalah kondisi internal yang merupakan kemampuan diri lebih unggul dari pada pihak lain dan juga berpotensi mengatasi ancaman serta memanfaatkan peluang. Menurut Miriam Budiarto (1988:52) Mengatakan bahwa yang diartikan dengan Kekuatan-kekuatan politik adalah bisa masuk dalam pengertian Individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan di sini kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses Pengambilan keputusan dalam system politik.

Kekuatan dari pada perempuan untuk bisa masuk dalam jabatan politik khususnya menjadi anggota legislative di DPRD Kabupaten Sangihe merupakan kemampuan secara individu yang muncul dari diri perempuan itu sendiri. Hal yang paling berpengaruh adalah sifat dan perasaan dari perempuan yang mampu merasakan hal-hal apa saja

yang bisa membuat orang lain nyaman sama misalnya kepada seorang anak karena sifat sebagai ibu yang hanya dimiliki oleh perempuan. Kekuatan seorang perempuan juga bisa dilihat dari segi mental karena pada dasarnya mental seorang perempuan lebih kuat dan mampu menerima segala jenis masukan dari pada masyarakat dalam hal ini sebagai anggota legislative.

Keadaan untuk bisa memahami dan lebih dengan masyarakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki dimana perempuan bisa lebih cepat mengaitkan memori dalam pikiran dan keadaan social. Tingkat pendidikan di kabupaten kepulauan sangihe untuk perempuan mengalami peningkatan dan setara dengan laki-laki hal ini juga menjadi kekuatan bagi perempuan karena melalui pendidikan masyarakat bisa menilai kualitas diri daripada perempuan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Rivaldi Sahea tahun 2018 dengan judul Analisis Strategi Politik Sri Wahyuni Maria Manalip-Petrus Simon Tuage Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013, kekuatan dalam dunia politik didapat dari pada nama besar pasangan calon dan juga kehandalan dalam dunia politik sehingga membuat kepercayaan masyarakat semakin tinggi.

Kekuatan perempuan bisa terlibat dalam politik merupakan suatu keadaan yang menguntungkan bila dibandingkan dengan laki-laki. Kekuatan perempuan ini juga merupakan kekayaan pikiran, social dan ekonomi yang miliki secara pribadi sehingga untuk bisa masuk dalam dunia politik dan mensejajarkan posisi dengan laki-laki.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan berdasarkan beberapa teori merupakan kekurangan atau keterbatasan kemampuan/sumber daya yang dimiliki secara internal sehingga berpotensi melemahkan dan juga mengurangi peluang dalam mencapai tujuan.

Kelemahan dari pada perempuan untuk bisa masuk dalam jabatan politik khususnya sebagai anggota legislative di DPRD Kabupaten Sangihe adalah hal yang menjadi tantangan tersendiri yang harus di hadapi oleh seorang yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Hal-hal yang menjadi kelemahan dari pada seorang perempuan adalah rasa percaya diri yang kurang bahkan hilang karena history budaya yang ada di Indonesia yaitu patriarki yang menyebut bahwa perempuan tidak melebihi dari pada laki atau dalam hal ini adalah pengecilan ruang lingkup aktivitas dari pada perempuan itu sendiri. Perempuan juga tertinggal dari laki-laki dalam hal kemampuan untuk bersosial dimana tidak banyak perempuan yang mempunyai kekuatan sosial dibanding laki-laki hal ini bisa menjadi kelemahan dari pada perempuan yakni kurang di kenal oleh masyarakat sehingga mengakibatkan perempuan tidak mendapat lebih daripada masyarakat.

Di Kabupaten Sangihe juga adanya pemberdayaan perempuan dalam bidang politik sehingga niat dan pengetahuan perempuan belum di kembangkan dan menyebabkan masih kurangnya perempuan yang memang tertarik untuk masuk dalam dunia perpolitikan di Kabupaten Sangihe.

Perempuan juga masih tertinggal dalam memanfaatkan potensi diri bahkan dengan peningkatan tingkat pendidikan yang ada antara laki-laki dan perempuan

tapi dalam hal tingkat partisipasi angka kerja antara perempuan dan laki-laki masih sangat jauh yaitu 44,32% berbanding 84,39%, hal ini membuat perempuan tidak bisa atau memiliki kekurangan secara ekonomi sehingga dalam persiapan untuk masuk dalam bidang politik mengalami hambatan. Kelemahan lain juga yang ada pada perempuan adalah kondisi fisik perempuan yang tidak sebanding dengan laki-laki sehingga hal berpengaruh pada seberapa kuat untuk bisa mencapai ruang lingkup masyarakat dengan keadaan geografis yang begitu sulit untuk di jangkau di beberapa tempat bahkan di pulau-pulau kecil yang di kabuoaten Sangihe hal mengakibatkan potensi untuk mendapatkan dukungan sangat kecil.

Dalam penelitian terdahulu oleh Martin Maringka tahun 2021 dengan judul Strategi Partai Politik Dalam Proses Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, kelemahan adalah suatu bentuk komunikasi baik itu dengan masyarakat ataupun sesama kader dalam partai politik.

Kelemahan yang ada pada perempuan untuk masuk dalam dunia politik adalah suatu kekurangan dari diri sendiri yang bisa merugikan. Keadaan ini dapat dipengaruhi oleh fisik dan juga tingkat pengetahuan dari pada perempuan serta keadaan ekonomi perempuan. Untuk bisa terlibat dalam bidang politik perempuan hari lebih meningkatkan kemampuan diri agar bisa meminimalisir kekurangan.

2. Peluang (*Opportunity*)

Peluang jika dilihat dari teori merupakan kondisi eksternal yang mempunyai potensi dalam menunjang dan memberikan kesempatan lebih dalam menjalankan strategi untuk mencapai tujuan. Peluang juga

memberikan kesempatan yang lebih menguntungkan kepada salah satu pihak dibandingkan pihak lain.

Peluang untuk seorang perempuan bisa terlibat dalam jabatan politik khususnya menjadi anggota legislative di DPRD Kabupaten Sangihe cukup terbuka lebar karena dengan berbagai perangkat hukum yang dibuat sebagai suatu kebijakan afirmatif untuk menyamaratakan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik khususnya. Berbagai kebijakan yang dibuat tersebut adalah UU Serta UU no.10 Tahun 2008 pasal 53, pasal 54, dan pasal 55 tentang kuota perempuan di kursi legislatif yang mana pencalonan anggota perempuan punya peluang yakni dengan 30% keterlibatan perempuan dari tiap partai politik.

Pemberdayaan kepada perempuan dalam bidang politik bisa untuk memberikan peluang lebih kepada perempuan karena dengan pemahaman tentang politik dan peningkatan niat dari pada perempuan yang terbangun dengan adanya pemberdayaan dalam bidang politik bisa membuat perempuan lebih giat dan punya tekad serta kepercayaan agar bisa memanfaatkan potensi diri dan secara social.

Perempuan juga mempunyai peluang yang cukup besar untuk bisa menjadi anggota DPRD di Kabupaten Sangihe yaitu lewat dukungan dari pada kaum perempuan yang ada di Kabupaten Sangihe karena pada dasarnya perempuan butuh perempuan untuk bisa menyampaikan aspirasi dan juga untuk mengembangkan potensi perempuan yang ada di Kabupaten Sangihe.

Secara sosial maupun agama di Kabupaten sangihe untuk perempuan sendiri menjadi suatu peluang besar dikarenakan kondisi sosial ataupun

agama kepercayaan masyarakat mayoritas memberikan ruang yang besar untuk perempuan bisa bersaing dengan laki atau dengan kata tidak ada batasan baik secara sosial kebudayaan masyarakat ataupun agama.

Berdasarkan Penelitian Terdahulu oleh Martin Maringka tahun 2018 dengan judul Strategi Partai Politik Dalam Proses Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, peluang yang ada melalui pencapaian elektabilitas yang bisa di tingkatkan dengan kualitas dan kekuatan social untuk bisa terpilih.

Peluang perempuan untuk terlibat dalam jabatan politik adalah suatu keadaan yang menguntungkan dari segi social dan juga . Peluang merupakan suatu kondisi yang lebih baik dan memberikan ruang untuk bisa mencapai suatu.

3. Ancaman (*Threats*)

Ancaman merupakan situasi kondisi masyarakat yang membuat keadaan diri tidak aman sehingga bisa mengakibatkan sebuah kerugian yang sangat berpengaruh dalam tercapai atau tidaknya suatu tujuan.

Ancaman yang harus dihadapi oleh perempuan untuk bisa terlibat dalam jabatan politik khususnya menjadi anggota legislative di DPRD Kabupaten Sangihe yaitu berasal dari pada keadaan social budaya masyarakat bahkan sampai ke seluruh Indonesia secara umum yaitu pengaruh budaya patriarki yang dengan saat ini menjadi ancaman secara mental yang harus dihadapi oleh seorang perempuan untuk terlibat dalam bersanding dengan laki-laki dalam jabatan politik khususnya. Perempuan dianggap sepatutnya hanya mengurus urusan rumah atau berada di dapur. Dan juga yang menjadi ancaman dari pada perempuan adalah

system pencalonan dari partai politik untuk bisa memenuhi syarat dengan cara yang tidak begitu baik hanya memperhatikan pemenuhan syarat tetapi tidak memperhatikan kualitas dari pada perempuan untuk di calonkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Rivaldi Sahea tahun 2018 dengan judul Analisis Strategi Politik Sri Wahyuni Maria Manalip-Petrus Simon Tuage Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013. Ancaman merupakan hal yang datang pada lawan politik dengan usaha untuk menjatuhkan pasangan calon.

Ancaman adalah keadaan dimana seseorang berada pada posisi yang tidak diuntungkan atau terdapat suatu hal yang selalu menggerogoti baik dalam pikiran atau secara fisik sehingga mengganggu proses untuk bisa mencapai sesuatu. Ancaman bagi perempuan merupakan suatu hal yang membuat keadaan perempuan semakin tertinggal dan seakan-akan selalu dihambat dalam proses pengembangan diri. Hal ini berasal dari pada kondisi social dan kadang juga berasal dari suatu system yang tidak professional.

Penutup

Kesimpulan

1. Kekuatan yang dimiliki oleh perempuan untuk bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan adalah berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri atau dengan kata factor internal dari perempuan itu yang bisa menjadi sebuah modal awal untuk bisa menjadi pegangan untuk terlibat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sangihe. Sebagai seorang perempuan yang

- memahami kondisi masyarakat dengan memori dan pikiran.
2. Perempuan juga tidak lepas dari berbagai kelemahan dalam bidang politik yaitu juga berasal dari diri perempuan itu sendiri yaitu kehilangan rasa percaya percaya untuk bisa membangun niat dan tekad yang dipengaruhi oleh tekanan dari dalam akibat daripada factor social budaya yang masuk sampai pada perempuan itu sendiri.
 3. Sebagai warga negara Indonesia perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Kesamaan hak menjadi peluang bagi perempuan untuk bisa ikut terlibat dalam jabatan khususnya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sangihe, peluang dari pada perempuan juga melalui kebijakan afirmatif yang dibuat perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembanguna di Indonesia secara umum dan Kabuapten Sangihe khususnya.
 4. Perempuan juga mendapat ancaman dari luar atau secara eksternal baik itu dari lawan politik maupun masyarakat secara luas. Budaya patriarki yang masih erat kaitannya dengan system social budaya masyarakat menjadi hal yang mengancam kelangsungan pelaksanaan kebijakan afirmatif dan juga masuk kedalam diri perempuan itu sendiri. Sehingga mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri sebagai seorang perempuan.
 2. Disarankan kepada perempuan di Kabupaten Sangihe untuk tidak lagi terkurung dalam budaya patriarki agar bisa lebih bebas dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam bidang politik.
 3. Disarankan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan pemberdayaan perempuan dibidang politik. Karena lewat pemberdayaan perempuan bisa membantu meningkatkan potensi diri perempuan dan juga bisa membangun pemahaman dari perempuan tentang politik sehingga semakin banyak perempuan yang terlibat dalam jabatan politik khususnya sebagai anggota DPRD kabupaten Sangihe untuk mencapai kesetaraan peran dalam bidang politik sehingga menghasilkan produk-produk legislative yang lebih baik seperti yang diharapkan dengan kebijakan afirmatif.
 4. Disarankan kepada masyarakat untuk tidak lagi menganggap perempuan sebagai pelengkap bagi laki-laki dan juga untuk tidak menganggap bahwa perempuan hanya mengurus urusan rumah seperti di dapur.

Saran

1. Disarankan kepada perempuan di Kabupaten Sangihe untuk lebih meningkatkan kemampuan serta potensi diri agar bisa bersaing dan mensejajarkan posisi dengan laki-laki dalam jabatan politik.

Daftar Pustaka

- Bressler, C. E. (2007). *Literary Criticism: An Introduction To Theory And Praticice 4th-ed.* Pearson Education, Inc.
- Budiardjo, M. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: PT. Gramedia.
- Daft, R. L. (2003). *Management (Fifth Edition)*. Jakarta: Erlangga.
- Dr. Rasyidin, F. A. (2018). *Gender Dan Politik: Keterwakilan Wanita Dalam Politik.* Lhokseumawe: Unimal Press.

- Kartono, K. (1983). *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kumorotomo, W. (1999). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, III*.
- Logeman. (1975). *Tentang Teori suatu Hukum Tata Negara Posistif, Terjemahan: Makatutu & J. C Pangkerego*. Van Hoeve: Ichtar Baru.
- Maringka, N. M. (2021). STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM PROSES PEMENANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA 2018. *jurnal politico, 10*.
- Ndraha, T. (1990). *Pengembangan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noer, D. (1983). *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Philips, A. (1998). *The Politics Of Presence*. USA: Oxford University Press.
- Rangkuti, F. (2003). *Analisis SWOT*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sahea, R. (2018). Analisis Strategi Politik Sri Wahyuni Manalip-Petrus Simon Tuange Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talud Tahun 2013. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1*.
- Sugiyono, P. (2013). *Menahani Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tripomo, T. d. (2005). *Manajemen Strategi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Trisakti Handayani, S. S. (2008). *Konsep dan Teknik: Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Tunggal, A. W. (2001). *Tanya Jawab Manajemen Internasional*. Jakarta: Harvarindo.
- Utrecht, E. (1957). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: NV Bali Buku Indonesia.
- Windy Lovelia Kumendong, J. K. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LIBA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA(Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa). *III*.